

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

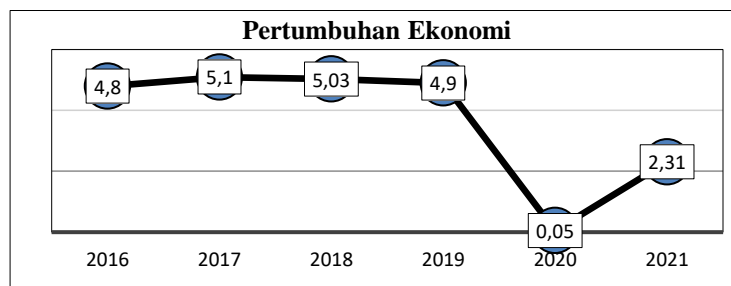
Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 (Kusumawati, 2018). Tujuan nasional dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu tujuan nasional yang mensejahterakan masyarakat adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan terus bersaing secara sehat dalam bidang perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2005 dalam Pusporini, 2020). Indikator yang dipakai dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah ini, pemerintah daerah memiliki hak yang salah satunya terdapat mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahannya, mengelola kekayaan negara, memungut pajak dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari badan usaha yang berusaha di daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah, dalam hal ini pemerintah daerah setiap tahunnya harus merencanakan anggaran yang akan diterima selama satu tahun dan anggaran yang akan dikeluarkan selama satu tahun.

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi daerah yang berada di lintas batas ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk meningkatkan perekonomian di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Indikator makro ekonomi menunjukkan bahwa tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa data PDRB pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif atau tidak tetap. Salah satu masalah yang di hadapi oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembagunan daerah adalah pengetahuan dan pemahaman akan potensi yang di miliki daerah tersebut dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.



sumber : BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, 2022

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2020

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara juga dilihat dari berbagai sektor ekonomi, dimana dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup baik. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Timor Tengah mengalami penurunan yang terjadi pada tahun 2020 diakibatkan karena adanya Virus Corona (Covid-19) yang menyebar di negara Indonesia. Dengan adanya Virus Covid-19 ini, sebagian alokasi dana untuk pembangunan yang dianggap kurang strategis dialihkan untuk penanganan Covid-19. Sehingga dana yang digunakan untuk pelaksanaan program sangat kurang, maka dampaknya adalah kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang sangat kecil dari seluruh sektor baik basis maupun non-basis yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sumber pendapatan daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Dari ketiga sumber pendapatan, dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pusat khususnya Dana Alokasi Umum yang berkontribusi pada daerah yang sangat besar, sedangkan pendapatan asli daerah penerimaannya sangatlah kecil. Upaya peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan Pendapatan Asli Daerah agar semakin mendorong pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja Daerah juga salah satu komponen penting di Kabupaten Timor Tengah Utara. Apabila pengeluaran pemerintah meningkat maka permintaan juga meningkat. Dengan demikian semakin besar belanja daerah maka semakin besar juga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dinilai belum terlalu efisien, hal ini dikarenakan jumlah belanja daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara masih terlalu tinggi sehingga belanja untuk pembangunan juga belum terlalu memadai di daerah kabupaten Timor Tengah Utara.

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Daerah (Rupiah)</b>	<b>Belanja Daerah (Rupiah)</b>
<b>2016</b>	920.232.839.000	792.260.648.000
<b>2017</b>	1.010.128.291.000	944.567.699.000
<b>2018</b>	975.948.067.000	954.774.971.000
<b>2019</b>	1.129.977.000.000	1.083.835.000.000
<b>2020</b>	910.113.000.000	615.695.000.000
<b>2021</b>	985.476.000.000	969.835.000.000

*Sumber : BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, 2021*

Tabel 1.2 menjelaskan pendapatan Daerah baik Pendapatan Asli, dana perimbangan mengalami perubahan yang tidak tetap dimana dana pendapatan daerah paling tinggi adalah di tahun 2019 dan paling rendah di tahun 2020. Kemudian dalam penggunaan anggaran yang tertuang dalam belanja daerah masih

berada di bawah akumulasi pendapatan daerah pertahunnya yaitu tertinggi di tahun 2019 dan terendah 2020. Hal ini berdampak kurang baik pada perekonomian Kabupaten Timor Tengah Utara dimana biaya yang seharusnya digunakan untuk memperlancar program kerja tetapi dikembalikan kepada pemerintah pusat.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, penerimaan dan pengeluaran pemerintah belum terlalu efisien. Dimana belanja daerah masih terlalu tinggi dibandingkan pendapatan daerah yang di dapatkan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan di masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh pendapatan daerah ( $X_1$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Apakah ada pengaruh belanja daerah ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Apakah ada pengaruh pendapatan daerah ( $X_1$ ) dan belanja daerah ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh pendapatan daerah ( $X_1$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Mengetahui pengaruh belanja daerah ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Mengetahui pengaruh pendapatan daerah ( $X_1$ ) dan belanja daerah ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil analisis dan pembuktian yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis tentang peningkatan pendapatan daerah dan belanja daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat dan nilai ilmiah bagi pengembangan ilmu ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah dan belanja daerah. Penelitian ini diharapkan menginspirasi kalangan peneliti dan akademisi untuk memperdalam kajian dengan melakukan penelitian lebih lanjut.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi media publikasi sekaligus informasi dan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah tepat dalam meningkatkan pendapatan daerah dan belanja daerah.